

ABSTRAK DISERTASI

1. Judul disertasi :

REKONTRUKSI KEBIJAKAN PENANGANAN PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH (PMI-B) BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT

2. Subjek : a. Rekontruksi Kebijakan
b. Pemulangan pekerja migran Indonesia
Bermasalah (PMI-B)
c. Keadilan Bermartabat
3. Nama : **H. M. Juramadi Esram, S.H., M.H.**
4. No Induk Mahasiswa : **PDIH.03.V.14.0227**
5. Program : Ilmu Hukum
6. Konsentrasi : Hukum Ketenagakerjaan
7. Tim Promotor : 1. Prof.Dr.Teguh Prasetyo, S.H., M.Si
2. Dr.Hj.Anis Mashdurohatun, S.H.,
M.Hum.
8. Tahun Kelulusan : 2019

ABSTRAK

Tanjungpinang merupakan salah satu Kota yang tingkat pemulangan para pekerja migran Indonesia bermasalah (PMI-B) yang di deportasi dari Malaysia sangat tinggi. Dalam seminggu, jadwal pemulangan PMI-B tersebut bisa mencapai 3-4 hari. Misalnya, dalam pemulangan PMI-B minggu ini di jadwalkan mulai dari hari selasa-sabtu. Kepulangan para PMI-B yang dideportasi dari Malaysia ke Tanjungpinang ini melibatkan 5 (lima) satuan tugas (satgas) diantaranya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Tanjungpinang, Dinas Perhubungan kota Tanjungpinang, Kepolisian Kawasan Pelabuhan, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang melalui pintu masuk pelabuhan Internasional Sri Bintan puru. Perumusan masalah yang dibahas di dalam disertasi ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana konstruksi kebijakan penanganan pemulangan pekerja migran Indonesia Bermasalah di luar negeri? 2) Bagaimana kelemahan kebijakan penanganan pemulangan pekerja migran Indonesia Bermasalah saat ini? 3) Bagaimana Rekonstruksi kebijakan penanganan pemulangan pekerja migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) berbasis nilai keadilan bermartabat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme.

Hasil penelitian ini adalah 1) Legislasi di tingkat nasional, terdapat Undang-undang No. 18/2017 yang mengatur Tentang Perlindungan Pekerja Indonesia Di Luar Negeri. Upaya pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang PPMI ini membentuk layanan terpadu satu atap/pintu di tingkat daerah (pasal 38) sehingga pemerintah daerah memiliki mandat untuk membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). 2) Lemahnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut: a. KTKLN yang belum berfungsi di luar negeri. b. Kegagalan Peran pekerja migran Indonesia dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. c. indikasi Penyimpangan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia. 3) Kewenangan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah.

Kata Kunci: Rekonstruksi Kebijakan, Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B), Keadilan Bermartabat.

ABSTRACT

Tanjungpinang is one of the cities where the rate of return of troubled Indonesian migrant workers (PMI-B) deported from Malaysia is very high. Within a week, the PMI-B return schedule can reach 3-4 days. For example, this week's PMI-B repatriation is scheduled to start from Tuesday-Saturday. The return of PMI-B deported from Malaysia to Tanjungpinang involves 5 (five) task forces (task force) including the Social and Manpower Office of Tanjungpinang City, Transportation Office of Tanjungpinang City, Port Area Police, and Class II Tanjungpinang Port Health Office through the entrance sri bintan pura International port. The formulation of the problems discussed in this dissertation is as follows: The formulation of the issues discussed in this dissertation is as follows: 1) How is the construction of the policy of handling the repatriation of Indonesian Migrant Workers Problems abroad? 2) How is the policy weakness in handling the return of Indonesian Workers Problems nowadays? 3) How to reconstruct the policy of handling repatriation of Problematic Indonesian Migrant Workers based on the value of dignified justice.

The method used in this study is sociological juridical legal research. The paradigm used in this study is the constructivism paradigm.

The results of this study are 1) Legislation at the national level, there is Law No. 18/2017 which regulates the Protection of Indonesian Workers Abroad. The government's efforts with the issuance of the PPMI Law established a one-stop / door integrated service at the regional level (article 38) so that the regional government has the mandate to establish Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). 2) The weakness of Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers can be seen from several aspects as follows: a. KTKLN that has not functioned abroad b. Failure Role of Indonesia migrant workers in the protection of overseas workers. c. Indication of irregularities Article 1 paragraph (9) of Law Number 18 Year 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad. 3) Authority of placement and protection of Indonesian Migrant Workers abroad is the authority of the Government.

Keywords: Policy Reconstruction, Handling of Problematic Return of Indonesia Migrant Workers Abroad (IMWA), Dignified Justice